



Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Determinants of North Kalimantan's Household Food Security 2023

Stevanus Ronaldo, Aulia Syefani

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara
Kontak penulis: stevanus.ronaldo@bps.go.id

Abstract

Issue about food security are crucial issues because they are directly related to basic daily needs. The current uncertain climate conditions, and global economic uncertainty, both directly and indirectly, will have an impact on households, which are the smallest unit in society. This research aims to analyze the food security of the North Kalimantan Province using the most current data in 2023, and also analyzes the social, economic and demographic variables that influence it. The research results shows that almost 50 percent of households in North Kalimantan in 2023 will have food insecure status, some of them are even food insecure and need more attention from the government. Then, by using multinomial logistic regression modeling, it was found that the variables number of household members, education of household heads, type of area, the status of PKH recipients, and poverty status had a significant effect on the food insecurity status of households in North Kalimantan in 2023, while the variables age of household heads, gender of household heads, marriage status of household heads, employment status of household heads, the sanitary condition of the house, and the status of BPNT recipients have not been statistically proven to have a significant effect.

Keywords: expenditure; North Kalimantan; food security; household.

Abstrak

Isu terkait ketahanan pangan merupakan isu yang krusial karena terkait langsung dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi iklim yang tidak menentu akhir-akhir ini, serta ketidakpastian ekonomi global baik secara langsung maupun tidak akan berdampak pada rumah tangga yang merupakan unit terkecil kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan pangan wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan data teraktual pada tahun 2023, beserta variabel sosial, ekonomi, dan demografi yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan hampir 50 persen rumah tangga di Kalimantan Utara pada tahun 2023 berstatus tidak tahan pangan, bahkan beberapa di antaranya termasuk rawan pangan dan perlu perhatian lebih dari pemerintah. Dengan menggunakan pemodelan regresi logistik multinomial dihasilkan bahwa variabel jumlah ART, pendidikan KRT, tipe daerah, status penerima PKH, dan status kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap status rawan pangan rumah tangga di Kalimantan Utara pada tahun 2023, sementara variabel usia KRT, jenis kelamin KRT, status perkawinan KRT, status bekerja KRT, Kondisi sanitasi rumah, dan status penerima BPNT secara statistik belum dapat dibuktikan berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: pengeluaran; Kalimantan Utara; ketahanan pangan; rumah tangga.

1. Pendahuluan

Ketahanan pangan dewasa ini masih menjadi isu yang banyak diperbincangkan di berbagai belahan negara. Kendati dikenal dengan abad keterbukaan dan globalisasi, pada faktanya di abad 21 saat ini masih banyak negara yang mengalami krisis pangan akut dan terus berlanjut hingga 2023. *Economist Impact* (2022) melaporkan nilai *Global*

Food Security Index (GFSI) Indonesia pada tahun 2022 sebesar 60,2 poin dan berada pada peringkat 63 dari 113 negara. GFSI mengukur: (1) aspek ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) kualitas dan keamanan, dan (4) keberlanjutan dan adaptasi pangan. Angka ini masih relatif tertinggal dibandingkan negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Vietnam yang menunjukkan pencapaian lebih baik di posisi 41 dan 46 dengan poin 69,9 dan 67,9.

Kondisi pertanian, ekonomi, iklim, serta politik di Indonesia pada tahun 2023 yang tidak menentu dan terus bergejolak berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Di bidang ekonomi, adanya konflik perang Ukraina dan Timur Tengah serta fluktuasi saham dunia secara tidak langsung membawa ketidakpastian ekonomi dan pangan di banyak negara termasuk Indonesia. Begitupun *FSIN and Global Network Against Food Crises* dalam *Global Report On Food Crises* (2023) menyatakan perubahan iklim yang cepat turut berimbas pada adanya pergeseran musim tanam dan panen pangan. Di sisi lain, kebijakan politik seperti bantuan pupuk dan pangan nontunai, hingga kebijakan ekspor dan impor pangan masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

Apabila ditelisik lebih lanjut, isu ketahanan pangan di Indonesia pada realitanya ditopang oleh bagaimana ketahanan pangan di level regionalnya. Sebagai provinsi termuda di Indonesia yang berbatasan langsung dengan proyek Pembangunan Ibukota Nusantara, Provinsi Kalimantan Utara dihadapkan pada persoalan terkait ketahanan pangan berdasarkan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kalimantan Utara tahun 2022 yang berada pada peringkat 21 dari 34 provinsi dengan 71,04 poin (Badan Pangan Nasional, 2022). IKP tersusun atas: (1) aspek ketersediaan pangan, (2) aspek keterjangkauan pangan dan (3) aspek pemanfaatan pangan. Hal ini salah satunya didukung secara spesifik oleh minimnya produksi pangan lokal di Kalimantan Utara seperti padi ladang dan beberapa ubi kayu yang belum mampu memenuhi seluruh permintaan pangan masyarakat, padahal keduanya merupakan komoditas andalan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Kalimantan Utara (Badan Pusat Statistik, 2023). Sebagai provinsi yang eksistensinya satu daratan dengan rencana IKN, Kalimantan Utara diharapkan menerima dampak positif dari pembangunan di Kalimantan Timur termasuk di sisi pangan agar tidak membawa pada permasalahan lainnya seperti ketimpangan yang semakin jauh.

Isu ketahanan pangan Kalimantan Utara di samping terlihat di sisi makro, juga perlu diteliti secara lebih rinci di tingkat mikro guna mendapatkan determinan yang lebih detail terkait ketahanan pangan di level terkecil. Dengan demikian diharapkan dapat mengangkat status ketahanan pangan di lingkup makro. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) menganalisis gambaran status ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara dan (2) menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga di Kalimantan Utara, dengan menggunakan data yang lebih *up to date* yaitu tahun 2023.

Beberapa penelitian terkait yang menjadi rujukan dalam penelitian ini mengemukakan adanya pengaruh variabel sosial, ekonomi, dan demografi terhadap status ketahanan pangan rumah tangga. Di antaranya ditulis oleh Afifah & Prasetyaningtyas (2024) dengan judul "Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Tulang Bawang Selama Pandemi Covid-19" mendapati bahwa jumlah anggota rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan status pengeluaran rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap status tahan pangan. Selain itu Ainistikmalia, Kharisma & Budiono (2022) menulis penelitian dengan judul "Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara" dan menemukan hasil

bahwa kemiskinan multidimensi, wilayah, pendidikan kepala rumah tangga (KRT), umur KRT, jumlah anggota rumah tangga (ART), dan konsumsi beras perkapita berpengaruh signifikan terhadap derajat ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian lainnya dilakukan oleh Naipupu & Kadir (2023) dengan judul “Determinan Status Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Analisis Regresi Logistik” didapatkan bahwa status daerah tempat tinggal, jenis kelamin KRT, jumlah ART, umur KRT, status bekerja KRT, Pendidikan KRT, lapangan usaha tempat KRT bekerja, persentase pengeluaran pangan terhadap pengeluaran rumah tangga, dan status kepemilikan lahan rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kerawanan pangan rumah tangga.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) Maret tahun 2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diolah berjenis *cross section* dengan unit *cross section* merupakan rumah tangga di Kalimantan Utara sebanyak 2709 sampel rumah tangga. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Status Ketahanan Pangan. Adapun variabel independen yang digunakan yaitu Usia Kepala Rumah Tangga, Jumlah Anggota Rumah Tangga, Status Kemiskinan (1: Tidak Miskin dan 0: Miskin), Tipe Daerah (1: Perkotaan dan 0: Perdesaan), Jenis Kelamin (1:Laki-laki dan 0:Perempuan), Status Perkawinan (1: Kawin dan 0: Tidak Kawin), Status Bekerja (1: Bekerja dan 0: Tidak Bekerja), Pendidikan Terakhir Kepala Rumah Tangga (1: >SMA dan 0: ≤SMA), Kondisi Sanitasi Rumah (1: Layak dan 0:Tidak Layak), Penerima Bantuan Pangan Nontunai (1: Ya dan 0: Tidak), dan Penerima Program Keluarga Harapan (1: Ya dan 0: Tidak).

Pengelompokan rumah tangga menjadi 4 status ketahanan pangan mengacu Jonsson dan Toole (1991) dalam Maxwell et al., (2000). Pengelompokan ini menggunakan persentase ketercukupan kalori dan pengeluaran pangsa pangan. Standar ketercukupan energi yang digunakan adalah 2.100 kkal/kapita/hari sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2019). Sehingga status ketahanan pangan rumah tangga berkodekan:

- 0: Jika ketercukupan energi $\leq 80\%$ dari 2100 kkal/kapita/hari dan pangsa pengeluaran pangan $\geq 60\%$ dari total pengeluaran maka akan dikategorikan sebagai “Rawan Pangan”.
- 1: Jika angka ketercukupan energi $\leq 80\%$ dari 2100 kkal/kapita/hari dan pangsa pengeluaran pangan $< 60\%$ dari total pengeluaran maka akan dikategorikan sebagai “Kurang Pangan”;
- 2: Jika angka ketercukupan kalori $> 80\%$ dari 2100 kkal/kapita/hari dan pangsa pengeluaran pangan $\geq 60\%$ dari total pengeluaran maka dikategorikan sebagai “Rentan Pangan”;
- 3: Jika angka ketercukupan kalori $> 80\%$ dari 2100 kkal/kapita/hari dan pangsa pengeluaran pangan $< 60\%$ dari total pengeluaran maka akan dikategorikan sebagai “Tahan Pangan”;

Penelitian ini menggunakan analisis eksploratif dengan statistika deskriptif yang digunakan adalah tabel. Selain itu digunakan pula analisis konfirmatif dengan statistika inferensia berupa pemodelan regresi logistik multinomial dikarenakan variabel

dependen yang digunakan berjenis nominal. Tahapan analisis yang dilakukan di antaranya: 1) mengajukan model, 2) mengestimasi parameter model, 3) melakukan uji kesesuaian model, 4) melakukan uji signifikansi hasil estimasi parameter model secara simultan dan parsial, 5) interpretasi. Berikut model yang diajukan pada penelitian ini dengan mengadopsi Afifah & Prasetyaningtyas (2024):

$$g_j(x) = \beta_{j0} + \beta_{j1}x_1 + \dots + \sum_{v=1}^{hm-1} \beta_{jmv}D_{mv} + \dots + \beta_{jp}x_p,$$

dengan, $g_j(x)$ adalah variabel dependen kategori j , β_{jmv} adalah koefisien parameter variabel *dummy* ke- v pada variabel independen ke- m dari fungsi logit ke- j , D_{mv} adalah variabel *dummy* ke- v pada variabel independen ke- m .

3. Hasil dan Pembahasan

Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas empat kabupaten dan satu kota yang dipisahkan dengan perairan sungai maupun laut. Sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang sedikit, pada faktanya pembangunan antar kabupaten/kota masih menunjukkan adanya perbedaan, termasuk di sisi ketahanan pangannya.

Tabel 1

Persentase Rumah Tangga di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Menurut Status Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	Kabupaten	Persentase Status Ketahanan Pangan				Total
		Rawan Pangan	Kurang Pangan	Rentan Pangan	Tahan Pangan	
1	Malinau	4,1	36,3	17,6	42,0	100
2	Bulungan	3,7	18,2	20,1	58,0	100
3	Tana Tidung	5,3	33,4	13,0	48,2	100
4	Nunukan	5,9	31,3	18,0	44,8	100
5	Tarakan	2,8	24,1	7,3	65,8	100
Jumlah		4,4	28,6	15,2	51,9	100

Berdasarkan data Susenas Maret 2023 hasil pengelompokkan status ketahanan pangan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan memiliki persentase rumah tangga dengan status tahan pangan tertinggi yaitu masing-masing sebesar 65,8 dan 58 persen. Kota Tarakan dengan statusnya sebagai perkotaan memungkinkan standar hidup dinikmati oleh masyarakatnya dan segala akses terhadap berbagai jenis pekerjaan yang lebih beragam turut meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Selain itu, Kabupaten Bulungan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara sedang menikmati proses pembangunan yang begitu cepat karena banyaknya pembangunan infrastruktur maupun ekonomi penunjang pusat ibu kota provinsi.

Secara agregat, sebanyak 51,9 persen rumah tangga di Kalimantan Utara pada tahun 2023 telah berstatus tahan pangan. Namun masih terdapat 28,6 persen rumah tangga dengan status kurang pangan. Belum tercukupinya kebutuhan akan konsumsi karbohidrat serta proporsi pengeluaran untuk makanan yang rendah disebabkan

pengeluaran rumah tangga dominan dialokasikan untuk barang-barang konsumsi nonpangan seperti sabun, pakaian, perlengkapan perumahan, dan lainnya dibandingkan untuk membeli beras atau bahan pangan sejenisnya.

Rumah Tangga dengan status rentan pangan di Kalimantan Utara pada tahun 2023 juga relatif banyak dengan persentase 15,2 persen. Kondisi bahwa rumah tangga telah mampu memenuhi kecukupan energi (>80 persen dari 2100 kkal/kapita/hari), dan proporsi pengeluaran untuk pangannya tinggi (>60 persen pengeluaran total rumah tangga) mengindikasikan bahwa untuk mencukupi kebutuhan kalori, rumah tangga dominan menggunakan proporsi pendapatannya untuk kebutuhan pangan. Akan tetapi rumah tangga dengan status rentan pangan dapat dihadapkan pula dengan terbatasnya pilihan-pilihan terhadap jenis makanan serta secara ekonomi tergolong dalam rumah tangga menengah ke bawah.

Selanjutnya, rumah tangga dengan status rawan pangan di Kalimantan Utara pada tahun 2023 berjumlah 4,4 persen. Nilai ini menggambarkan bahwa rumah tangga belum mampu memenuhi kecukupan energi (<80 persen dari 2100 kkal/kapita/hari) tetapi proporsi pengeluaran pangan tinggi (>60 persen pengeluaran total rumah tangga). Kondisi ini terjadi ketika rumah tangga sudah memberikan porsi terbesar dari seluruh pengeluarannya untuk kebutuhan pangan tetapi kalorinya masih tidak mencukupi standar nasional. Sehingga rumah tangga pada kelompok ini secara ekonomi masuk dalam taraf menengah ke bawah bahkan tergolong kategori miskin (Hasanah et al., 2021; Setyorini et al., 2023). Hal ini sejalan pula dengan Arif, Isdijoso, Fatah & Tamyis (2020) yang menyebutkan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan kondisi rawan pangan.

Meskipun persentasenya tidak lebih besar dibandingkan kelompok lainnya, namun rumah tangga dengan status rawan pangan di Kalimantan Utara perlu menjadi perhatian dan harus diantisipasi karena di dalamnya terdapat banyak rumah tangga miskin pula. Oleh karena itu, untuk mengetahui variabel apa di balik masih terdapatnya rumah tangga dengan status rawan pangan di Kalimantan Utara pada tahun 2023, maka analisis dilanjutkan melalui pemodelan regresi logistik multinomial.

Tabel 2
 Hasil Uji Kesesuaian Model Tahun 2023.

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	5493,248	5181	0,001
Deviance	3753,455	5181	1,000

Uji kesesuaian model regresi menghasilkan statistik *chi-square deviance* dengan *p-value* (yaitu, $p = 1$) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti model sudah cocok digunakan.

Tabel 3
 Hasil Uji Simultan

Model	Model Fitting Criteria		Likelihood Ratio Test		
	-2 Log Likelihood		Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	5009,587				
Final	4356,302		653,285	33	<0,001

Uji simultan digunakan untuk melihat apakah ada koefisien yang signifikan secara statistik. Berdasarkan model *final* nilai $p < 0,001$ menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5 persen terdapat variabel independen yang berpengaruh signifikan di dalam model. Sehingga dilanjutkan dengan uji signifikansi parameter model secara parsial.

Tabel 4
Hasil Uji Parsial *Likelihood Ratio*

Variabel Bebas		Model Fitting Criteria -2 Log Likelihood of Reduced Model	Sig.
1	<i>Intercept</i>	4356,302	
2	Usia Kepala Rumah Tangga	4365,965	0,022*
3	Jumlah Anggota Rumah Tangga	4558,576	<0,001*
4	Tipe Daerah	4403,360	<0,001*
5	Jenis Kelamin KRT	4374,389	<0,001*
6	Status Perkawinan	4370,155	0,003*
7	Status Bekerja KRT	4359,211	0,406
8	Pendidikan Terakhir KRT	4382,472	<0,001*
9	Kondisi Sanitasi Perumahan	4370,374	0,003*
10	Penerima BPNT	4378,212	<0,001*
11	Penerima PKH	4367,645	0,010*
12	Status Kemiskinan	4472,111	<0,001*

Keterangan: *signifikan pada alfa 0,05

Berdasarkan tabel 4, seluruh variabel independen signifikan memengaruhi status ketahanan pangan rumah tangga kecuali variabel status bekerja KRT. Pada suatu rumah tangga, tidak selalu kepala rumah tangga yang menjadi sumber utama pembiayaan rumah tangganya, termasuk konsumsi pangannya. Namun di dalamnya, tidak dimungkiri terdapat andil anggota rumah tangga yang lain yang telah bekerja dan memiliki pendapatan. Selain itu, bantuan pemerintah yang cukup gencar diberikan kepada masyarakat di Kalimantan Utara turut mereduksi rumah tangga yang kekurangan makanan. Selanjutnya dihasilkan nilai estimasi parameter model (koefisien regresi) seperti tertera pada tabel 5.

Persamaan regresi yang terbentuk untuk mewakili perbandingan kategori status rawan pangan dengan kategori referensi tahan pangan adalah sebagai berikut:

$$\hat{g}_{\text{rawan pangan}} = - 5,422 - 0,010Usia + 0,631ART + 1,062Daer_i + 0,308JK_i - 0,526SP_i + 0,151SB_i + 1,118PT_i + 0,306KSP_i - 0,335BPNT_i - 0,947PKH_i + 2,947Msk_i$$

Nilai rasio kecenderungan dilihat dari nilai $exp(B)$. Berdasarkan persamaan regresi yang terbentuk di atas, variabel jumlah anggota rumah tangga (ART) memiliki rasio kecenderungan $exp^{0,631} = 1,879$. Koefisien variabel jumlah ART adalah positif, ini berarti bahwa kecenderungan rumah tangga untuk berstatus rawan pangan dibandingkan tahan pangan akan bertambah sebesar 1,879 kali untuk setiap penambahan jumlah ART sebanyak satu orang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naipupu & Kadir (2023), Ainistikmalia, Kharisma & Budiono (2022), dan Aguilera & Jatmiko (2023) yang menunjukkan bahwa setiap penambahan ART dalam rumah tangga akan

meningkatkan kecenderungan rumah tangga tersebut untuk menjadi rawan pangan atau semakin tidak tahan pangan. Sementara itu, hasil penelitian ini berbeda dari penelitian oleh Fitria & Sukim (2023) yang memberikan hasil negatif untuk korelasi jumlah ART dan status ketahanan pangan di Provinsi NTT Tahun 2021.

Tabel 5
 Hasil Uji Parsial pada Kategori Status Rawan Pangan dengan Tahan Pangan

	Variabel Bebas	B	Sig.	Exp(B)
1	<i>Intercept</i>	-5,422	<0,001*	
2	Usia Kepala Rumah Tangga	-0,010	0,336	0,990
3	Jumlah Anggota Rumah Tangga	0,631	<0,001*	1,879
4	Tipe Daerah			
	Perdesaan	1,062	<0,001*	2,892
	Perkotaan			
5	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	0,308	0,631	1,361
	Perempuan			
6	Status Perkawinan			
	Tidak Kawin	-0,526	0,363	0,591
	Kawin			
7	Status Bekerja KRT			
	Tidak Bekerja	0,151	0,680	1,163
	Bekerja			
8	Pendidikan Terakhir KRT			
	≤ SMA	1,118	0,001*	3,058
	> SMA			
9	Kondisi Sanitasi Perumahan			
	Tidak Layak	0,306	0,401	1,358
	Layak			
10	Penerima BPNT			
	Tidak	-0,335	0,319	0,716
	Ya			
11	Penerima PKH			
	Tidak	-0,947	0,001*	0,388
	Ya			
12	Status Kemiskinan			
	Miskin	2,947	<0,001*	19,052
	Tidak Miskin			

Keterangan: *signifikan pada alfa 0,05

Nilai rasio kecenderungan untuk variabel tipe daerah adalah $exp^{1,062} = 2,892$. Koefisiennya bernilai positif, yang berarti bahwa kecenderungan rumah tangga yang tinggal di perdesaan untuk berstatus rawan pangan daripada tahan pangan adalah sebesar 2,892 kali lebih besar dibandingkan rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif, Isdijoso, Fatah & Tamyis (2020), Ainistikmalia, Kharisma & Budiono (2022), Naipupu & Kadir (2023), yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan lebih tahan pangan dibandingkan daerah perdesaan.

Nilai rasio kecenderungan untuk variabel pendidikan terakhir KRT adalah $exp^{1,118} = 3,058$. Koefisiennya bernilai positif, yang berarti bahwa kecenderungan rumah tangga yang pendidikan terakhir KRTnya adalah SMA ke bawah untuk berstatus rawan pangan daripada tahan pangan adalah 3,058 kali lebih besar dibandingkan rumah tangga dengan pendidikan terakhir KRT diploma atau sarjana. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2019), Ainistikmalia, Kharisma & Budiono (2022), dan Naipupu & Kadir (2023), bahwa tingkat pendidikan KRT adalah faktor awal yang berkaitan dengan pekerjaan dan syarat untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, pendapatan yang lebih tinggi akan meningkatkan pilihan-pilihan konsumsi oleh rumah tangga termasuk ketahanan pangannya.

Nilai rasio kecenderungan untuk variabel penerima PKH adalah $exp^{-0,947} = 0,388$. Koefisiennya bernilai negatif, yang berarti rumah tangga yang menerima PKH untuk berstatus rawan pangan daripada tahan pangan adalah $1/0,388 = 2,577$ kali lebih besar dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima PKH. Hal ini sesuai dengan peruntukan PKH bagi keluarga yang statusnya kurang secara ekonomi, maka rumah tangga yang mendapatkan PKH sudah pastinya dari sisi pemenuhan pangan akan kurang dibandingkan rumah tangga yang tidak mendapatkan PKH dengan asumsi program PKH ini sudah merata dilaksanakan dan tepat sasaran dibagikan kepada rumah tangga yang memang membutuhkan. Penelitian ini sesuai dengan Arif, Isdijoso, Fatah & Tamyis (2020) yang menunjukkan bahwa akses pangan melalui perlindungan sosial PKH untuk memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga penerima bantuan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Selain itu Ainistikmalia, Kharisma & Budiono (2022) menjelaskan bahwa rumah tangga yang tidak menerima raskin lebih tahan pangan dibandingkan penerima raskin.

Nilai rasio kecenderungan untuk variabel status kemiskinan adalah $exp^{2,947} = 19,052$. Koefisien ini bernilai positif yang berarti bahwa rumah tangga dengan status miskin memiliki kecenderungan untuk berstatus rawan pangan daripada tahan pangan sebesar 19,052 kali lebih besar dibandingkan rumah tangga yang berstatus tidak miskin. Penelitian ini sejalan dengan Setyorini et al., (2023) di mana ketika daya beli rumah tangga menurun akan menyebabkan penurunan konsumsinya. Selain itu sejalan juga dengan penelitian oleh Aguilera & Jatmiko (2023) yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang pengeluarannya lebih rendah dengan atau di bawah garis kemiskinan lebih rawan pangan dibandingkan rumah tangga yang pengeluarannya lebih tinggi atau di atas garis kemiskinan. Pengeluaran dikorelasikan dengan pendapatan. Ketika pengeluaran rumah tangga besar secara nominal, secara tidak langsung pendapatannya juga seharusnya sama atau bahkan lebih besar dari angka tersebut. Di beberapa kasus untuk pengeluaran rumah tangga dalam membayar kebutuhannya diperoleh dari rumah tangga lain, kredit, pinjaman bank, atau hutang ke pihak lain. Sehingga, pendekatan pengeluaran sudah relevan untuk menggambarkan kondisi perekonomian rumah tangga.

Hasil pengukuran *pseudo R-Square* dari nilai *Nagelkerke* yaitu 0,240 artinya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen adalah sebesar 24 persen dan sisanya 76 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Tabel 6
Hasil Uji *Pseudo R-Square*.

Cox and snell	0,214
Nagelkerke	0,240
McFadden	0,108

4. Kesimpulan

Hasil penelitian didapatkan bahwa: (1) masih terdapat 48,1 persen rumah tangga di Kalimantan Utara berstatus tidak tahan pangan; di antaranya 4,4 persen rumah tangga berstatus rawan pangan yaitu memiliki ketercukupan energi $\leq 80\%$ dari standar 2100 kkal/kapita/hari dan pangsa pengeluaran pangan $\geq 60\%$ dari total pengeluaran (2) dengan menggunakan pemodelan regresi logistik multinomial dihasilkan bahwa variabel jumlah ART, pendidikan KRT, tipe daerah, status penerima PKH, dan status kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap status rawan pangan rumah tangga di Kalimantan Utara pada tahun 2023, sementara variabel usia KRT, jenis kelamin KRT, status perkawinan KRT, status bekerja KRT, Kondisi sanitasi rumah, dan status penerima BPNT secara statistik belum dapat dibuktikan berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga di Kalimantan Utara pada tahun 2023.

Adapun saran yang dapat diberikan di antaranya bagi penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk menambahkan variabel kesehatan dan melakukan analisis pola konsumsi masyarakat untuk melihat keragaman dan kualitas pangan rumah tangga. Adapun bagi *stakeholder* terkait kesejahteraan rakyat seperti Dinas Sosial dan Pangan, dapat memberikan penegasan regulasi mengenai program PKH agar pemanfaatannya dipergunakan rumah tangga untuk konsumsi pangan sehingga kebutuhan minimal kalori dapat tercukupi.

Daftar Pustaka

- Afifah, N., & Prasetyaningtyas, W. A. (2024). *Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Tulang Bawang Selama Pandemi Covid-19 Determinants of Household Food Security in Tulang Bawang Regency During the Covid-19*. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>
- Aguilera, T., & Jatmiko, Y. A. (2023). Pemodelan Tingkat Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2021 dengan Pendekatan Regresi Logistik Ordinal. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 5(2), 90. <https://doi.org/10.13057/ijas.v5i2.65141>
- Ainistikmalia, N., Kharisma, B., & Budiono, B. (2022). Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 72–97. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.05>
- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020. *The SMERU Research Institute*.
- Badan Pangan Nasional. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022*.

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Provinsi Kalimantan Utara*.
- Economist Impact. (2022). *Global Food Security Index 2022*. <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/>
- Fitria, M. D., & Sukim. (2023). Determinan Status Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Nusa Tenggara Timur 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, 257–266.
- FSIN and Global Network Against food Crises. (23 C.E.). *Global Report On Food Crises 2023*. www.fightfoodcrises.net
- Hasanah, E. A., Heryanto, M. A., Hapsari, H., & Noor, T. I. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pengeluaran Pangan. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(2), 1560–1571.
- Kementerian Kesehatan. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. In *Menteri Kesehatan*.
- Maxwell, D., Levin, C., Armar-Klemesu, M., Ruel, M., Morris, S., & Ahiadeke, C. (2000). Urban Livelihoods and Food and Nutrition Security in Greater Accra, Ghana. In *Food Policy Rest*.
- Naipupu, A. E., & Kadir. (2023). Determinan Status Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Analisis Regresi Logistik. *JSTAR*, 3(1), 37–49. <https://doi.org/10.5300/JSTAR.V3I01.38>
- Sari, D. W., Yudha, P. C. A., & Restikasari, W. (2019). The Effect of Economic and Social Infrastructure on Household Food Security in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(2), 191–201.
- Setyorini, N., Sumastuti, E., & Utami, R. H. (2023). *The Urgency of Household Food Security during the Covid-19 Pandemic*. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>